

Sinergitas Kebijakan Program “Makassar Ta’ Tidak Rantasa” di Kota Makassar

¹Muhammad Jusman,²Hasselman,³Hasrat Arief Saleh

¹Program Studi Administrasi Pembangunan

² Program Studi Administrasi Pembangunan, ³ Program Studi Administrasi Pemerintah Daerah
Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Email : jusmanhamid@yahoo.com

Abstract

Synergy of policies is important for the government to run its programs in order to achieve bigger gain. The aim of the research was to find out and analyze synergy of program policy “Makassar ta’ Tidak Rantasa” (Our Clean Makassar) in Makassar City. The research used qualitative method. The data were obtained through observation, interview, and documentation to the informant direction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the research indicate that the Program Policy “Makassar ta’ Tidak Rantasa” (Our Clean Makassar) is a 100-working-day program of mayor and vice mayor of Makassar about cleanliness. The programs covering in this policy have not been maximally synergic one another. Consequently, Makassar is still “Rantasa” (dirty) since there are some things that need improvement such as the formulation of problem solving, government’s role, and socialization to community.

Keywords: Synergy; Program; Clean.

Abstrak

Sinergitas kebijakan penting bagi pemerintah dalam menjalankan program-programnya agar saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil yang lebih besar dari pada jumlah bagian perbagian. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisa Sinergitas Kebijakan Program “Makassar ta’ Tidak Rantasa” di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data ditempuh melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi terhadap informasi yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Sedangkan analisis data melalui proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Program “Makassar ta’ Tidak Rantasa” adalah program 100 hari kerja walikota dan wakil walikota Makassar, mengenai kebersihan. Program-program yang ada dalam kebijakan tersebut belum bersinergi secara maksimal, akibatnya Makassar tetap saja “Rantasa” (kotor), karena ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan misalnya perumusan penyelesaian masalah, peran pemerintah dan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Sinergi; Program; Bersih

PENDAHULUAN

Perpustakaan Berdasarkan UU. No. 18 Tahun 2008 bahwa dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan Nasional dan Provinsi, pengelolaan sampah diartikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam pelaksanaan konsep tersebut di lapangan diharapkan instansi pemerintah dapat bekerjasama, bersinergi, bahu membahu dalam mencapai hasil kebijakan yang diinginkan. Sebagai upaya merubah watak atau perilaku manusia atau kelompok atau merealisasikan program-program yang semula cenderung bekerja atau berjalan sendiri-sendiri baik di lingkungan masyarakat maupun dalam organisasi. “Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah” (Dunn, 2003).

Sehubungan dengan hal tersebut untuk mengatasi persoalan sampah, Pemkot Makassar mengeluarkan Perda. No. 4 Tahun 2011, tentang pengelolaan sampah, Perda. No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Kebijakan Program Makassar ta’ Tidak Rantasa’ (MTR), 15 Juni 2014, tentang penanganan kebersihan, dengan sejumlah strategi untuk mencapai keberhasilannya antara lain: 1. Kerja bakti (TNI/Polri), 2. Jumat Bersih, 3. MABELLO (Makassar bersih lorong-

lorong ta’), 4. LISA (Lihat sampah ambil), menuju MABASA (Makassar Bebas Sampah) (Tompo, 2014).

Namun pemberlakuan Perda dan kebijakan ini tidak efektif, permasalahan tetap muncul yaitu Makassar belum bebas dari sampah. Sampah tetap saja ditemukan di banyak lokasi, termasuk di area publik. Fungsi hukum sebagai alat rekayasa tidak maksimal dibentuk oleh perda tersebut, karena tidak ada keinginan serius untuk menegakkannya. Padahal hampir setiap tahun Pemkot Makassar meminta kuota aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (Tompo, 2014). Berbagai macam orang yang terlibat dalam analisis kebijakan Mereka mengkaji “problem” dan hubungan antara kebijakan publik dengan problem tersebut; Mereka mengkaji isi dari kebijakan publik; Mereka mengkaji apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pembuat keputusan dan kebijakan. Mereka tertarik dengan input dan proses di area kebijakan; Mereka mengkaji konsekuensi kebijakan dari segi output dan hasilnya (Parsons, 2011).

Hal tersebut kemudian memotivasi munculnya sinergi dalam berbagai kegiatan dan program untuk merumuskan suatu kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan kebersihan. Keterkaitannya dengan penanganan sampah, sinergi kebijakan sangat diperlukan untuk menyatukan atau menyamakan persepsi agar dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai secara efektif, efisien dalam rangka mewujudkan kota yang bersih dari sampah. Sinergi (*Synergy*) adalah bentuk Kerjasama Win-win yang dihasilkan melalui kolaborasi masing-masing pihak tanpa adanya perasaan

kalah”. Sinergi adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil lebih besar dari pada jumlah bagian per bagian. Sinergitas pada hakikatnya merupakan sebuah interaksi dari dua pihak atau lebih dan menjalin hubungan yang bersifat dinamis guna mencapai tujuan bersama (Covey, 1997).

Kunci dari berhasilnya sinergi kebijakan dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek mendasar yaitu: 1. Problem Solving, 2. Intergovernment games, 3. Networking (Rhodes, 1996). Implementasi dari suatu kebijakan adalah suatu program. Untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak dapat diukur dengan cara sebagai berikut: 1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program. 2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran. 3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik (Jones, 1996).

Penelitian terdahulu mengenai Sinergitas dilakukan oleh Rizky dkk (2013), “Sinergitas Stakeholders untuk Administrasi Publik yang Demokratis dalam Perspektif Teori Governance (Studi pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyoagung Bersatu Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat masih berkonsep Top-Down, yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa melihat apa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan proses terjalannya sinergitas antar Stakeholders berawal dari permasalahan sampah dan adanya proses demokrasi

melalui musyawarah yang dilakukan untuk mencari solusi permasalahan sampah

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa sinergitas kebijakan program “Makassar ta’ Tidak Rantasa” di Kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan Sinergis antara Program-Program, yang ada di dalam “Kebijakan Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar”. dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu variable atau tema, gejala atau keadaan yang ada yaitu keadaan gejala (fenomena) menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tentang Sinergitas Kebijakan Program “Makassar ta’ Tidak Rantasa” dilakukan di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, dengan waktu pelaksanaan mulai 28 Mei sampai dengan 1 Agustus 2015.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui informan/responden ialah orang-orang yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti yang terkait langsung baik yang mewakili individu ataupun institusi yang terkait dengan penelitian ini, yaitu: Kabag. Humas Pemkot Makassar, Anggota DPRD Kota Makassar, SKPD (Pejabat Kecamatan Makassar dan Kecamatan Mamajang), Dinas Keindahan dan Kebersihan Pemkot Makassar. Dan lain-lain yang terkait dengan “Sinergitas Kebijakan Program Makassar ta’ Tidak Rantasa”

Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan diolah melalui teknik dianalisa secara kualitatif sesuai tahap-tahap yaitu :1. Reduksi data, ialah data yang diperoleh dicatat, diteliti, disesuaikan tema dan polanya. 2. Penyajian data dengan teks yang bersifat naratif sehingga mudah dimengerti atau dipahami. 3. Verifikasi ialah memilah-milah data yang penting, kurang penting dan yang tidak penting, agar penelitian terarah. 4. Melakukan Triangulasi ialah pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data, untuk keperluan perbandingan terhadap data tersebut.

Data-data yang dikumpulkan dari hasil wawancara akan digabungkan dengan data-data hasil observasi dan data dari dokumen-dokumen tertulis lain untuk diolah secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinergitas Kebijakan Program “Makassar ta’ Tidak Rantasa’ di Kota Makassar, adalah keterpaduan antara semua elemen yang terkait yang diawali dengan adanya masalah sampah, kemudian dilakukannya pemecahan masalah (Problem Solving), peran antar pemerintah menyikapi masalah sampah (Intergovernment games) dan system jejaring komunikasi yang digunakan untuk mensosialisasikan ke Masyarakat (Networking).

Pertama, problem solving: bahwa hasil analisis menunjukan bahwa Undang-undang, Perda, Kebijakan dan program-program mengenai penanganan sampah tidak efektif. Sanksi dan denda yang tertuang dalam aturan-aturan tersebut tidak membuat masyarakat jera dan takut. Hal ini terjadi karena aturan-aturan yang

dikeluarkan tidak dikawal, tidak diawasi dan tidak direalisasikan secara maksimal oleh pemerintah kota Makassar.

Kedua, intergovernmental games, hasil analisis menunjukkan bahwa keterpaduan interaksi yang konstruktif inter pemerintah, sektor swasta dan masyarakat masih lemah, tingginya ego sektoral menyulitkan koordinasi, ada yang berpendapat bahwa urusan kebersihan hanya bertumpu pada unit kerja yang membidangi yaitu Dinas Kebersihan saja, sehingga terjadi dualisme dalam pengangkutan sampah antara Kecamatan dengan Dinas kebersihan.

Ketiga, Networking hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai program kebersihan tidak tersentuh secara merata diseluruh masyarakat kota Makassar termasuk di komplek-komplek perumahan, kurangnya bimbingan teknik kepada masyarakat.

Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Sinergitas Kebijakan Program “Makassar ta’ Tidak Rantasa’ di Kota Makassar belum sepenuhnya bersinergis akibatnya sampah masih berserakan di beberapa titik termasuk di area publik, dengan telah dibuktikan melalui pengujian hipotesis yang dilakukan.

Analisis Problem Solving, Problem solving yaitu suatu pendekatan dengan cara problem identification untuk ketahap sintesis kemudian dianalisis yaitu pemilahan seluruh masalah sehingga mencapai tahap application selanjutnya komprehension untuk mendapatkan solution dalam penyelesaian masalah tersebut, langkah-langkah dalam problem solving yaitu sebagai berikut: kesadaran akan adanya masalah; merumuskan masalah; mencari data dan merumuskan hipotesa-hipotesa itu dan kemudian

menerima hipotesa yang benar. Tetapi problem solving itu tidak selalu mengikuti urutan yang teratur, melainkan dapat meloncat-loncat antara macam-macam langkah tersebut, lebih-lebih apabila orang berusaha memecahkan masalah yang kompleks (Sarjanaku, 2010). Dalam hal ini pemerintah Makassar telah melakukan pemecahan masalah baik pemerintah pusat maupun daerah. Adanya UU No. 18 Tahun 2008, Perda No. 4 Tahun 2011 dan Perda No. 11 Tahun 2011 dan Kebijakan Program lain dengan tujuan agar pemecahan masalah sampah lebih efektif sehingga Kota Makassar bebas dari sampah. Sehubungan dengan kurang efektifnya Undang-undang dan Perda, Kebijakan dan program-program kebersihan, sebagai wujud kurangnya perumusan masalah oleh Pemerintah Kota Makassar terhadap Kebijakan program Makassar ta' Tidak Rantasa'. Hal ini berdampak terhadap pelaksanaan system pemecahan masalah sampah sehingga masalah sampah tetap menjadi masalah.

Analisis intergovernmental games, Teori permainan mengasumsikan bahwa, "semua peserta berusaha mengoptimalkan perilaku/tindakan/usaha mereka masing-masing dan berusaha untuk memaksimalkan keberhasilan dan meminimalkan kegagalan dalam batas-batas perilaku yang dibolehkan (dianalogikan dengan permainan). Hasilnya terlihat tidak hanya tergantung pada perilaku. Negara/pemerintah, privat, dan masyarakat, memiliki pembagian hak dan tanggung jawab bersama yang juga dapat diatur dalam berbagai jenis kontrak sosial, seperti peraturan dan UU. Kontrak-kontrak ini merupakan hasil produk pengaturan bersama yang melibatkan ketiga sektor tersebut. Pemerintah berperan sebagai pembuat regulasi dan

mengamankan hasil-hasil regulasi berdasarkan kesepakatan bersama ketiga sektor tadi. Masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi dari pemerintah dalam rangka mengawasi kinerja lembaga pemerintahan dan mitra kerjanya yang dijamin oleh sistem legal-formal. Sistem ini dapat memberi implikasi yuridis kepada lembaga-lembaga yang melalaikan fungsinya untuk mewujudkan transparansi informasi dan akuntabilitas publik (Praadila, 2008). Peran pemerintah dan unsur-unsurnya dibawah (SKPD) adalah merupakan pilar utama terhadap pelaksanaan Kebijakan Program "Makassar ta' Tidak Rantasa' di Kota Makassar. Kerja sama antar SKPD bertujuan selain sebagai contoh agar masyarakat ikut berpartisipasi terhadap program-program yang ada juga merupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemerintah. Namun ada sebagian pemerintah (SKPD) yang ada di jajaran pemkot Makassar belum maksimal melaksanakan program ini yang beranggapan bahwa urusan kebersihan adalah urusan Dinas terkait. Dengan demikian peran antara pemerintah dapat menghambat kelancaran sinergi kebijakan program Makassar ta' Tidak Rantasa'.

Analisis networking, Jaringan komunikasi pemerintah dapat berjalan dengan baik jika para aktor berinteraksi dan melakukan mekanisme pertukaran sumber daya dalam jaringan yang terjadi secara berulang-ulang dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dalam kehidupan keseharian, Keberulangan yang menunjukkan adanya sifat kontinuitas proses itu kemudian secara bertahap akan memunculkan suatu aturan yang mengatur perilaku mereka dalam jaringan, dari yang paling rendah tingkat mengikatnya (*binding*) sampai pada yang paling kuat

(Warsono, 2009). Dengan demikian, terbangunnya dan diterimanya aturan-aturan oleh para pelaku jaringan hanya bisa berjalan melalui proses negosiasi yang berlangsung terus menerus, tanpa ada kekuatan kekuasaan mengisyaratkan agar hubungan komunikasi antara komponen yang satu dengan yang lain berjalan dengan lancar (Rhodes, 1996). Pemkot Makassar telah mensosialisasikan kebijakan program Makassar ta' Tidak Rantasa' dan Program-program lain melalui media cetak dan elektronik. Hal ini dimaksudkan agar program-programnya dapat diketahui oleh semua lapisan masyarakat, (misalnya kegiatan kerja bakti kapan waktu dan dimana lokasinya, sarana dan prasarana yang harus dibawa, komunikasi atau penyampaian kepada masyarakat/stakeholder sekurang-kurangnya satu bulan sebelum hari H agar masyarakat bisa mengatur waktunya). Namun demikian berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini bahwa sosialisasi kurang efektif, (terlalu dekat antara penyampaian informasi dengan pelaksanaan kegiatan sehingga masyarakat kurang siap). Selain dari pada itu sosialisasi kurang menyentuh di pelosok-pelosok kota dan perumahan-perumahan sehingga partisipasi masyarakat sangat kurang.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penelitian tentang Sinergitas Kebijakan Program Makassar ta' Tidak Rantasa' di Kota Makassar, dapat disimpulkan bahwa program-program yang tertuang dalam Kebijakan Makassar ta' Tidak Rantasa' kurang bersinergi dari segi problem solving, bahwa pemerintah telah memberi jalan pemecahan masalah yaitu Undang-undang dan Perda, namun kurang

efektif karena tidak ada pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Saran

SKPD seharusnya saling menunjang atau bersinergi untuk menangani kebersihan ini. Tidak ada pembagian tugas yang jelas dalam pengangkutan sampah, saling mengharap dan pada akhirnya sampah tidak diangkut, kurangnya sarana dan prasarana memicu terjadinya penumpukan sampah yang tidak pada tempatnya. Oleh karena itu perlu peran aktif masing-masing stakeholder, pemerintah dan masyarakat tidak perlu menunggu peraturan baru bekerja. Sedangkan dari segi Networking, Pemkot telah melakukan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, namun media-media tersebut kurang tersentuh di perumahan-perumahan apalagi di pelosok-pelosok kota sehingga masyarakat kurang mengetahuinya. Sehubungan dengan hal tersebut sebaiknya Pemkot membuat jaringan dengan memberdayakan system door to door melalui RW/RT atau lurah yang dilakukan kira-kira 1 bulan sebelum hari H dan harus berkesinambungan setiap harinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Covey R. (1997). *The 7 Habits of Highly effective People*. Edisi Revisi Cetakan 1. Grogol Jakarta Barat: Binarupa Aksara.
- Dunn N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*, Cetakan ke 10. Yogyakarta: PT. Hamindita Graha Widya
- Jones O. (1996) *Pengantar kebijakan publik (public policy)*. Penerjemah Ricky Istamto: editor, Nashir Budiman
- Parsons. (2011). *Public Policy; Pengantar Teori dan Praktik Analisis*

- Kebijakan*. Cetakan ke 4. Jakarta: Perdana Group.
- Praadilla. (2008). Upaya Pelaksanaan Sinergitas Kebijakan Transportasi sebagai penunjang pengembangan Potensi Pariwisata di Kota Blitar. Jurnal, Universitas Brawijaya Malang.
- Rhodes R.A.W. (1996). *The New Governance: Governing without Government*. London: Wiley-Blackwell.
- Rizky dkk. (2013). *Sinergitas Stakeholders Untuk Administrasi Publik yang Demokratis dalam Perspektif Teori Governance (Studi pada tempat pengelolaan sampah terpadu Mulyoagung bersatu Kecamatan Dau Kab. Malang)*. Tesis. Administrasi Publik: Universitas Brawijaya Malang
- Sarjanaku. (2010). Pengertian Problem Solving. Diakses 6 September 2015. From: <http://Google.com>
- Tompo. (2014). *Masa Depan Makassar (Dinamika Demokrasi dan Pemerintahan)*, Makassar: Badan Arsip Perpustakaan dan pengolahan data.
- Warsono. (2009). *Networking Dalam Intergovernmental cooperation*. Albany New York State: Departement of state devision of local Government service.